

KEBIJAKAN JAM KERJA DAN SHIFT PRODUKSI

PT Nusantara Footwear Manufacturing

1. Tujuan

Kebijakan Jam Kerja dan Shift Produksi ini disusun untuk mengatur waktu kerja karyawan agar proses produksi sepatu berjalan efektif, teratur, dan sesuai dengan target produksi perusahaan. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja dan kesehatan karyawan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh karyawan PT Nusantara Footwear Manufacturing, khususnya karyawan produksi yang bekerja pada lini cutting, stitching, assembling, finishing, serta unit pendukung produksi lainnya.

3. Jam Kerja

1. Jam kerja normal ditetapkan sesuai ketentuan perusahaan.
2. Hari kerja berlaku dari Senin sampai dengan Sabtu.
3. Waktu istirahat diberikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan perusahaan.
4. Perubahan jam kerja dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional.

4. Sistem Shift Produksi

4.1 Pembagian Shift

1. Perusahaan menerapkan sistem kerja shift untuk mendukung proses produksi.
2. Shift kerja dibagi menjadi beberapa jadwal sesuai kebutuhan lini produksi.
3. Pembagian shift ditetapkan oleh Divisi Operasional & Produksi.

4.2 Penugasan Shift

1. Karyawan ditempatkan pada shift tertentu berdasarkan jadwal kerja.
2. Perubahan shift hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atasan.
3. Karyawan wajib hadir sesuai shift yang telah ditentukan.

5. Kerja Lembur

1. Kerja lembur dilakukan apabila diperlukan untuk memenuhi target produksi.
2. Lembur harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.
3. Perhitungan lembur dilakukan sesuai kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

6. Ketidakhadiran dan Keterlambatan

1. Karyawan yang berhalangan hadir wajib menyampaikan izin.
2. Keterlambatan dan ketidakhadiran dicatat dalam sistem absensi.
3. Pelanggaran terkait jam kerja dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.

7. Penutup

Kebijakan Jam Kerja dan Shift Produksi ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dengan diterapkannya kebijakan ini secara konsisten, diharapkan proses produksi sepatu dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan kesejahteraan karyawan.